

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2017/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT LAYANAN DAN PEMANFAATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Agus Santoso
2. Jabatan : DIREKTUR LAYANAN DAN PEMANFAATAN
3. NHK : 469654

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.406.855.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/108 m² di Jakarta Selatan,
HASIL SENDIRI Rp. 310.128.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m²/53 m² di Jakarta Selatan,
HASIL SENDIRI Rp. 212.477.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m²/262 m² di Jakarta Selatan,
HASIL SENDIRI Rp. 884.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.500.000

1. MOTOR, Honda NF 125 TD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 25.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.467.855.000

III. HUTANG Rp. 9.980.400**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.457.874.600

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.